

PENGUJIAN MODEL “*SLIPERRY SLOPE*” DALAM KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Iwan Sidharta

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, Bandung

Email: i_sidh@stiepas.ac.id

Abstract

The aim of this study was to test the slippery slope model in the taxpayer compliance framework. The method used in this research is quantitative analysis method by doing confirmatory factor analysis testing where the technique used in collecting data is done through questionnaires and sampling technique with nonprobability sampling counted 167 respondents. Based on the results obtained proved that the dimension of trust and dimension of power is the compulsory taxpayer form factor. The trust dimension can explain taxpayer compliance as big as the dimension of the power can explain to the extent that the overall dimension can account for 62,61% of taxpayer compliance.

Keywords: trust, power, taxpayer compliance.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji model “sliperry slope” dalam kerangka kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis kuantitatif dengan cara melakukan pengujian confirmatory factor anlysis dimana teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dilakukan melalui kuesioner dan teknik pengambilan sampel dengan nonprobability sampling sebanyak 167 orang responden. Berdasarkan hasil penelitian didapat terbukti bahwa dimensi kepercayaan dan dimensi kekuasaan merupakan faktor pembentuk kepatuhan wajib pajak. Dimensi kepercayaan dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar sedangkan dimensi kekuasaan dapat menjelaskan sebesar sehingga secara keseluruhan dimensi tersebut dapat menjelaskan sebesar 62,61% dari kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: kepercayaan, kekuasaan, kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi pajak adalah menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah dalam pembiayaan pembangunan negara. Pembangunan yang tertuang dalam APBN tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah perlu menggali sumber-sumber penerimaan dari berbagai sektor pajak yang potensial untuk digali. Secara umum penerimaan terbesar pemerintah bersumber dari sektor pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peran penting penerimaan pajak merupakan sumber utama dalam melakukan pembangunan.

Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak masih belum memadai, kondisi ini dapat menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negawara melalui pajak. Berdasarkan pengamatan awal wajib pajak yang terdaftar di wilayah Jawa Barat hanya 3 juta dari 40 juta warga. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Jawa Barat. Ketidak patuhan wajib pajak baik perorangan maupun badan usaha dapat menyebabkan tidak optimalnya pendapatan Negara dari pajak. Berapa hal yang menyebabkan hal tersebut seperti ketidak jujuran dalam melaporkan penghasilan pribadi, tidak adanya transparansi dalam melaporkan transaksi keuangannya, dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak belum optimal.

Penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional membutuhkan peran dari berbagai pihak. Salah satu pendekatan dalam melihat efektivitas penerimaan pajak dapat ditinjau dari sisi perilaku pembayar pajak (Walsh, 2013; Ritsatos, 2014). Salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pembayaran pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik. Menurut Kichler, Hoelzle & Wahl (2008) terdapat berbagai macam pendekatan dalam melihat tingkat kepatuhan wajib pajak, salah satu model yang dikembangkan adalah '*slippery slope*' yang merupakan pendekatan dari paradigma perilaku wajib pajak. Model ini banyak telah diuji secara empiris di berbagai Negara, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kepercayaan, keadilan dan kekuatan memegang

peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Gobena & Van Dijke, 2016; Kastlunger et al., 2013; Gangl et al., 2013; Prinz, Muehlbacher & Kirchler, 2014). Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan adanya dimensi kepercayaan dan dimensi kekuasaan. Namun belum banyak yang melakukan penelitian dengan menggunakan model *slippery slope* tersebut. Untuk itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengujian model '*slippery slope*'. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah model '*slippery slope*' dibentuk dari dimensi kepercayaan dan dimensi kekuatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman mengenai model '*slippery slope*' sebagai kerangka acuan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menjadi acuan dalam mengembangkan kebijakan dalam perpajakan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Peraturan mengenai pajak di atur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) nomor 28 tahun 2007. Menurut peraturan tersebut bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak baik individu maupun badan usaha bersifat memaksa atas perundang-undangan yang berlaku serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan negara untuk kemakmuran rakyat. Ini mengindikasikan bahwa karakteristik dari pajak merupakan iuran wajib, berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak ada kontraprestasi, yang bertujuan untuk membiayai pembangunan nasional. (Sidharta, 2014; 2017; Sidharta & Wati, 2015).

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka perlu adanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap perilaku yang taat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara yang baik. Menyadari pentingnya pajak maka upaya ke arah peningkatan penerimaan negara dari sektor ini harus digiatkan. Untuk dapat tercapainya kesejahteraan serta tujuan yang diharapkan perlu juga didukung dari berbagai faktor, salah satu faktor pendukung di sektor ini ialah kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak jika mengacu pada OECD (2001) dapat di bagi menjadi dua yaitu kepatuhan administratif dan kepatuhan teknikal. Secara umum kepatuhan wajib pajak jika dilihat dari sudut social ekonomi dapat dipengaruhi oleh masalah-masalah sosial, yang terdiri dari perilaku masyarakat, dukungan masyarakat, dan karakteristik masyarakat seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan pola konsumsi. Kepatuhan Wajib pajak juga dipengaruhi oleh norma subjektif.

Berdasarkan pada teori social kognitif yang diajukan oleh Ajzen (1985; 1991) dan Fisbien & Ajzen (1975) terdapat norma yang bersifat subjektif bagian dari teori perilaku terencana. Sedangkan dari sudut pandang ekonomi kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari indikator-indikator makro. Pendekatan mengenai kepatuhan wajib pajak jika dilihat dari sudut pandang psikologi dapat melihat dari moral wajib pajak. Saat ini model yang terbaru dalam pendekatan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak yaitu model '*slippery slope*' sebagai yang dikembangkan oleh Kirchler, 2007; Kirchler et al., 2008; Muehlbacher & Kirchler, 2010).

Kerangka acuan '*slippery slope*' menekankan interaksi penting antara kekuasaan dan kepercayaan wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak. Dengan mengetahui interaksi antara kekuasaan dan kepercayaan pada otoritas pajak sangat penting dalam mengambil kebijakan mengenai kepatuhan pajak. Beberapa penelitian terbaru seperti yang dilakukan oleh Prinz et al., 2010; Ruiu & Lisi, 2011; Lisi (2012) yang melakukan percobaan laboratorium dan eksperimen online menunjukkan bahwa kepercayaan dan kekuasaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. demikian pula oleh Fischer & Schneider (2009) dan Alm, Kirchler & Muehlbacher, (2012). Oleh karena itu perlu adanya penelitian untuk melakukan pengujian model '*slippery slope*' dalam kerangka acuan kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di salah satu Kantor Pelayanan

Pajak Pratama di Kota Bandung selama 4 bulan. Operasional variabel dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dengan dua dimensi yaitu dimensi kepercayaan dan dimensi kekuasaan. Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner terhadap responden. Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah teknik Nonprobability dengan jumlah responden sebanyak 167 responden.

Dalam melakukan pengujian dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama melakukan pengujian secara confirmatory factor analysis dengan merujuk pada nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) lebih besar dari 0,05 dan Barlett test dengan taraf signifikansi $p < 0.05$. KMO ini digunakan untuk mengetahui apakah konstruk yang membentuk dimensi kepercayaan dan kekuasaan ini bersifat unidimensional atau tidak. CFA ini dilakukan dengan cara rotasi varimax. Setelah dilakukan pengujian CFA maka selanjutnya dilakukan pengujian model structural dengan menggunakan alat bantu Lisrel, tujuannya untuk membuktikan secara empiris apakah faktor yang telah terbentuk tadi memenuhi spesifikasi model yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian melalui SPSS diketahui bahwa hasil KMO dan Bartlett test menunjukkan bahwa pengujian CFA dapat dilanjutkan. Kemudian dari hasil rotasi varimax dapat diketahui dimensi kepercayaan dan dimensi kekuasaan berkelompok menjadi 2 faktor, seperti yang disajikan dibawah ini;

Tabel 1. KMO dan Bartlett test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.848
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	801.701
	df	45
	Sig.	.000

Sumber: data diolah

Tabel 2. Component matrix

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
X1.1	.770	-.031
X1.2	.829	.162
X1.3	.712	.283
X1.4	.697	.416
X1.5	.679	.381
X2.1	.598	.423
X2.2	.364	.706
X2.3	.059	.871
X2.4	.149	.775
X2.5	.340	.660

Sumber: data diolah

Tabel diatas memeperlihatkan bahwa indikator mengelompok menjadi 2 faktor, dimana faktor pertama adalah dimensi kepercayaan dan faktor kedua adalah dimensi kepercayaan. Sedangkan variasi yang dapat dijelaskan oleh kedua faktor tersebut adalah seperti yang disajikan di bawah ini

Tabel 3. Total Variance Explained

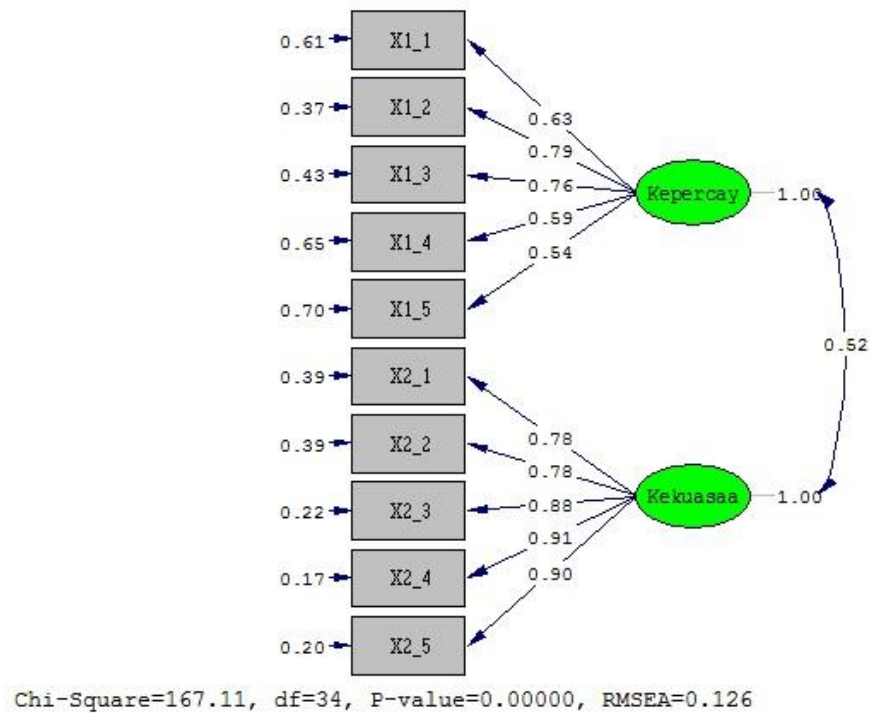
Component	Total Variance Explained								
	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4.908	49.079	49.079	4.908	49.079	49.079	3.365	33.648	33.648
2	1.353	13.531	62.610	1.353	13.531	62.610	2.896	28.962	62.610
3	.887	8.872	71.482						
4	.626	6.255	77.737						
5	.613	6.131	83.868						
6	.403	4.026	87.893						
7	.366	3.657	91.551						
8	.357	3.566	95.117						
9	.256	2.558	97.675						
10	.233	2.325	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Sumber: data diolah

Hasil perhitungan *Variance Explained* menunjukkan bahwa faktor satu yaitu dimensi kepercayaan dapat menjelaskan sebesar 49,08% sedangkan faktor kedua yaitu dimensi kekuasaan dapat menjelaskan sebesar 13,53% sehingga secara keseluruhan kedua faktor tersebut dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 62,61%.

Hasil pengujian model structural equation modeling adalah sebagai berikut;



Gambar 1. Model Struktural CFA

Uji kecocokan model (*goodness of fit*) dilakukan untuk mengetahui apakah model yang dibentuk dapat menggambarkan hubungan antar variabel yang sedang diteliti sehingga dapat dikategorikan ke dalam model yang baik. Uji kecocokan model dalam *structural equation modelling* (SEM) dapat dilihat berdasarkan beberapa kriteria pengujian kecocokan model. (Yusup, Hardiyana & Sidharta, 2015) Kecocokan model pengukuran (*measurement model fit*) dilakukan melalui evaluasi validitas dan reliabilitas model pengukuran. *Confirmatory Factor Analysis* digunakan dalam SEM untuk menguji masing-masing indikator dari setiap dimensi yang membentuk variabel penelitian.

Berdasarkan pada hasil perhitungan diketahui bahwa Chi-square (X^2) untuk model yang diteliti diperoleh sebesar 167.11 dengan p-value = 0.000. Goodness of Fit Index (GFI) sebesar 0.8987, berarti model dalam penelitian ini masuk kedalam kategori *marginal fit*. RMSEA (*Root Mean Square Error of Approximation*) 0,128. Artinya bahwa model yang diteliti adalah kurang baik. *Tucker Lewis Index* (TLI) TLI atau *Non-Normed Fit Index* (NNFI) sebesar 0.9284,

sehingga dapat dikatakan bahwa model *good fit*. Nilai NFI (*Normed Fit Index*) sebesar 0.9377 menunjukkan bahwa model yang dibentuk dalam penelitian ini adalah baik. Nilai AGFI (*Adjusted Goodness of Fit Value*) adalah 0.8087, artinya adalah bahwa model tersebut termasuk kategori *marginal fit*. Nilai IFI (*Incremental Fit Index*) sebesar 0.9401 menunjukkan bahwa model yang dibentuk adalah *good fit*. Nilai *Comparative Fit Index* (CFI) sebesar 0.9442, ini menunjukkan bahwa model yang dibentuk adalah *good fit*.

Hasil ukuran kesesuaian model menunjukkan model yang diperoleh secara umum sudah kriteria GOF. Hasil perhitungan ukuran ketepatan model (*Goodness of Fit measures*) menunjukkan model merupakan model yang baik untuk menggambarkan hubungan variabel yang diteliti.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dua dimensi yaitu dimensi kepercayaan dengan indikator 1) percaya bahwa membayar pajak adalah sesuatu yang benar 2) untuk mendukung negara dan warga lainnya, 3) karena saya suka berkontribusi pada kebaikan semua orang, 4) karena bagi saya itu hal yang wajar untuk dilakukan, 5) karena saya menganggapnya sebagai tugas saya sebagai warga negara, dan dimensi kekuasaan dengan indikator 1) karena banyak pemeriksaan pajak yang dilakukan, 2) karena kantor pajak sering melakukan audit, 3) karena saya tahu saya akan diaudit, 4) karena hukuman penghindaran pajak sangat berat, 5) karena saya tidak tahu persis bagaimana cara menghindari pajak tanpa menarik perhatian petugas pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari dimensi kepercayaan dan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi kepercayaan menggambarkan wajib pajak menganggap pembayaran pajak sebagai sumbangan sukarela untuk kepentingan Negara. Sedangkan dimensi kekuasaan menggambarkan kekuatan otoritas dalam menerapkan undang-undang perpajakan, baik melalui anggaran yang tepat, audit menyeluruh terhadap wajib

pajak, pendeteksian pajak penipuan dan penghukuman pelanggaran hukum pajak. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model kepatuhan wajib pajak sehingga dapat memperkaya kajian penelitian dalam perpajakan. Penelitian ini perlu pengembangan lebih lanjut untuk membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak terdiri dari dua dimensi dengan cara menggunakan populasi dan sample yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., Kirchler, E., & Muehlbacher, S. (2012). Combining Psychology and Economics in the Analysis of Compliance: From Enforcement to Cooperation. *Economic Analysis and Policy*, 42(2), 133-151.
- Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds), *Action-control: From cognition to behavior* (pp. 11-39). Heidelberg: Springer.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- Fischer, J.A.V. & Schneider, F. (2009). The puzzle of tax compliance revisited: testing the 'slippery slope' hypothesis for trust and power against field data, working paper SGVS, OECD, Paris, January
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research*.
- Gangl, K., Muehlbacher, S., de Groot, M., Goslinga, S., Hofmann, E., Kogler, C., & Kirchler, E. (2013). "How can I help you?" Perceived service orientation of tax authorities and tax compliance. *FinanzArchiv: Public Finance Analysis*, 69(4), 487-510.
- Gobena, L. B., & Van Dijke, M. (2016). Power, justice, and trust: A moderated mediation analysis of tax compliance among Ethiopian business owners. *Journal of Economic Psychology*, 52, 24-37.
- Kastlunger, B., Lozza, E., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2013). Powerful authorities and trusting citizens: The Slippery Slope Framework and tax compliance in Italy. *Journal of Economic Psychology*, 34, 36-45.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kirchler, E., Hoelzle, & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: the 'slippery slope' framework, *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225.
- Lisi, G. (2012). Testing the slippery slope framework. *Economics Bulletin*, 32(2), 1369-1377.

- Prinz, A., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2014). The slippery slope framework on tax compliance: An attempt to formalization. *Journal of Economic Psychology*, 40, 20-34.
- Ritsatos, T. (2014). Tax evasion and compliance; from the neo classical paradigm to behavioural economics, a review. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 10(2), 244-262.
- Ruiu, G., & Lisi, G. (2011). Tax morale, slippery-slope framework and tax compliance: A cross-section analysis. *Dipartimento di Scienze Economiche. Cassino (FR): Università degli Studi di Cassino*.1-33.
- Sidharta, I., & Wati, M. (2015). Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Urunan Desa (URDES) Berdasarkan Pada Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Computech & Bisnis*, 9(2), 95-107.
- Sidharta, I. (2014). Perpajakan. *Bandung: STMIK Mardira Indonesia*.
- Sidharta, I. (2017). Pengantar Perpajakan. Yogyakarta: *Diandra Kreatif*.
- Walsh, K. (2013). Understanding taxpayer behaviour–new opportunities for tax administration. *The Economic and Social Review*, 43(3, Autumn), 451-475.
- Yusup, M., Hardiyana, A., & Sidharta, I. (2015). User acceptance model on e-billing adoption: A study of tax payment by government agencies. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 3(4), 150-157.